

RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TABALONG



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran berjalan.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung, 21 April 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, M.T

Pembina Utama Muda
NIP. 197805081996121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan Rkpd	26
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49
3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	49
BAB IV PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun berjalan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah. Adapun substansi dari Renja Perubahan dimaksud adalah Penyesuaian Indikator Kinerja/Sub kegiatan, Kelompok Sasaran serta Pagu Indikatif.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan bulan Juni 2025 serta capaian Rencana Strategis (Renstra), capaian program dan kegiatan, indikatif pagu anggaran perkegiatan yang mengalami perubahan baik yang akan di tambah, dikurang ataupun bergeser.

Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD Perubahan) dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten.

Rencana Kerja Perubahan ini sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), rencana kerja anggaran perangkat daerah yang telah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh tim eksekutif dan legislatif selanjutnya diproses untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan APBD Perubahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pencanaan Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 23 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah :

1. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Perubahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran / perubahan;
2. Kelompok Sasaran Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran / perubahan yang mendukung Visi dan Misi Bupati 2025-2029;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah kebijakan dan acuan untuk :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dan Rencana Perjanjian Kinerja Tahunan;
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2025
4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat, Bidang-Bidang serta antar instansi terkait;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistimatika Penulisan
BAB II		Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4	Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
BAB III		Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
BAB IV		Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2025 dengan mengacu APBD Tahun 2025 yang sudah disahkan

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.1.12 Kesesuaian Renja Perubahan Tahun 2025 Terhadap APBD Induk Tahun 2025

Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan APBD Tahun 2025, tidak mengalami perubahan yaitu terdapat 13 Kegiatan baik pada Renja Perubahan 2025 maupun pada Induk APBD 2025.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap sub kegiatan yang ada di renja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan APBD Induk tahun 2025, berjumlah sama yaitu 46 Sub Kegiatan.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Anggaran Renja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebesar Rp. 33,002,162,026,-

sedangkan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika berdasar APBD (Induk) Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 26.202.432.666,- Terdapat selisih Anggaran antara APBD dengan Renja Perubahan 2025 sebesar

Rp. 6,799,729,360,-

seiring dengan proses penganggaran yang berjalan. Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini

Tabel 2. 1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Perubahan dengan
APBD Induk Tahun 2025

No	Uraian	Renja Perubahan 2025	APBD Induk 2025
1	Program	5	5
2	Kegiatan	13	13
3	Sub Kegiatan	46	46
4	Pagu Anggaran	Rp. 33,002,162,026,-	Rp. 26.202.432.666,-

Tabel 2. 2 Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Perubahan dan APBD Tahun 2025

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Renja Perubahan 2025		APBD Induk 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indukatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			33,002,162,026		26.202.432.666
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP BB	Nilai AKIP BB	11.970.533.640	Nilai AKIP BB	12.479.831.280
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100%	92.997.000	100%	164.577.000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	75,889,000	8 dokumen	141.465.000
2.16.01.2.01.02	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 dokumen	17,108,000	1 dokumen	23.112.000
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan tepat waktu	100%	8,425,651,000	100%	8,425,651,000
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	8,425,651,000	29 orang	8,425,651,000
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	350,754,120	100%	468.934.120
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40,709,120	40 Paket	40.709.120
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	25 Orang	310,045,000	25 Orang	428.225.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum		475,193,790		661.759.130
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	20,794,104	7 Paket	35.433.939

2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	121,849,615	6 Paket	158.546.120
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19,767,893	2 Paket	19,767,893
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	10,800,000	4 Dokumen	10,800,000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	301,982,178	50 Laporan	437.211.178
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah		310.478.420		440.450.720
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		10 buah	6,347,190	10 buah	6,347,190
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	234,147,536	17 Unit	364.119.836
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20 Unit	69,983,694	20 Unit	69.983.694
2.16.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100%	1.517.190.880	100%	1,517,190,880
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	443.400.000	72 laporan	443,400,000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 laporan	1,073,790,880	126 laporan	1,073,790,880
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	798,268,430	100%	798,268,430
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	461,860,000	26 Unit	461,860,000

2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	277,908,430	1 Unit	277,908,430
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	58,500,000	29 Unit	58,500,000
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100%	8,722,082,496	100%	7.172.082.496
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Informasi yang dikomunikasikan	100%	8,722,082,496	100%	7.172.082.496
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 dokumen Laporan	4,708,360,000	12 dokumen Laporan	3.608.360.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Laporan Permohonan	374,997,796	4 Laporan Permohonan	149.997.796
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 Dokumen Rekomendasi	60,359,700	4 Dokumen Rekomendasi	60.359.700
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan	7500 berita Media	3,578,365,000	7500 berita Media	3.353.365.000

		media berbayar sesuai kriteria/juknis				
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		100%	11,378,654,570	100%	5.398.312.070
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Government dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	28,607,000	100%	36.034.000
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen	28,607,000	4 Dokumen	36.034.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Government dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya		11,350,047,570		5.362.278.070
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	38 Aplikasi	170,136,138	38 Aplikasi	170,136,138
2.16.03.2.02. 0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	8 Dokumen	12,280,000	8 Dokumen	12,280,000
2.16.03.2.02. 0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	6 Laporan	16,360,000	6 Laporan	16,360,000
2.16.03.2.02. 0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	111 Dokumen	2,040,000	111 Dokumen	2,040,000
2.16.03.2.02. 0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	352,755,424	1 Dokumen	380.722.924
2.16.03.2.02. 0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	7 Dokumen	23,813,500	7 Dokumen	35.347.000,
2.16.03.2.02. 0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	102,743,500	1 Aplikasi	115.407.000
2.16.03.2.02. 0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah	Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	4 Dokumen	13,049,500	4 Dokumen	24.059.000

2.16.03.2.02. 0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6 Unit	4,642,251,295	6 Unit	1.295.906.000
2.16.03.2.02. 0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	5,856,647,724	40 Perangkat Daerah	3.105.365.008
2.16.03.2.02. 0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen	70,902,989	2 Dokumen	92.070.000
2.16.03.2.02. 0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	77,827,500	12 Dokumen	103.345.000
2.16.03.2.02. 0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	3 Aplikasi	9,240,000	3 Aplikasi	9.240.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			564,247,920		627.557.420
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			564,247,920		627.557.420
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		564,247,920		627.557.420
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 Orang	157,905,040	80 Orang	195.933.040
2.20.02.2.01. 0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	1	188,512,400	1	173.562.400,
2.20.02.2.01. 0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	60%	56,335,000	60%	89.198.000,
2.20.02.2.01. 0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	30 Dokumen	134,999,480	30 Dokumen	137.061.980
2.20.02.2.01. 0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 Dokumen	26,496,000	30 Dokumen	0
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			366.643.400		524.649.400
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			366.643.400		524.649.400
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi		312.789.400,		458.458.400
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	70,052,200	3 Dokumen	115.676.200

2.21.02.2.01. 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	144,061,700	1 dokumen	161.984.200,
2.21.02.2.01. 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	52,338,000	1 dokumen	104.054.000
2.21.02.2.01. 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39 Perangkat Daerah	46,337,500	39 Perangkat Daerah	76.744.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten		53,854,000		66.191.000
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	39 Perangkat Daerah	53,854,000	39 Perangkat Daerah	66.191.000

Berdasarkan data perbandingan antara Renja Perubahan 2025 dan APBD 2025 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100% persen. Namun ada perbedaan total Anggaran Renja Perubahan 2025 dan APBD Induk 2025 ini disebabkan Penambahan dana pada Bidang IKP Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Relasi Media Menambah Kebutuhan Kerjasama Media untuk Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Program Prioritas Tabalong Smart serta Pemberian Hibah PWI, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Menambah Pelatihan/ Workshop PPID, Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Menambah Perjalanan Dinas, dan sub kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Menambah Media Luar Ruang Reklame.

Sedangkan pada Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi pada Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas ada penambahan command center tanpa fisik, terdiri dari aplikasi dan peralatan TIK,CCTV, listrik command center, instalasi grounding command center,Genset , listrik pertama kali.

Pada Bidang Statistik Persandian ada penambahan perjalanan dinas untuk koordinasi, konsultasi dan pelatihan. Di Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral ada penambahan Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia serta Belanja Sosialisasi, Kursus/Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Bagian Sekretariat sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ada Penambahan Kontribusi dan pengalihan kontribusi bidang ke sekretariat. pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ada Penambahan Perjalanan Dinas untuk keperluan Bimtek-Bimtek dan Workshop.

Sedangkan pada Sekretariat ada penambahan Kontribusi sampah yang tertinggal menganggarkan pada tahun 2025, penambahan baju batik Tabalong seiring berambahnya ASN Diskominfo dan Meja Skat beserta kursi.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai triwulanII tahun 2025

Tabel 2. 3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai Triwulan II Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Target/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d tw II Tahun 2025			Catatan
			Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		25.024.846.628		7,717,592,063	30.84	50%	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Nilai AKIP BB	11,970,533,640	Nilai AKIP BB	3,646,175,206	30.46	50%	
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	92,997,000	100%	9.833.000	12.96	50%	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,889,000	8 dokumen	9.833.000	12.96	50%	
2.16.01.2.01.09	'Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	17,108,000	1 dokumen	-		50%	
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan tepat waktu	8,425,651,000	100%	3.037.942.972	36.06	50%	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8,425,651,000	29 orang	3.037.942.972	36.06	50%	
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM	350,754,120	100%	16,190,000	4.62	50%	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40,709,120	40 Paket	9790000	24.05	50%	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	310,045,000	25 Orang	6,400,000	2.06	50%	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	475,193,790		118,638,498	24.97	50%	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	20,794,104	7 Paket	6,755,000	32.49	50%	

		Kantor yang Disediakan						
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	121,849,615	6 Paket	16,055,000	13.18	50%	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	19,767,893	2 Paket	7,713,200	39.02	50%	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10,800,000	4 Dokumen		0.00	50%	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301,982,178	50 Laporan	88,115,298	29.18	50%	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	310,478,420				50%	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6,347,190	10 buah			50%	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	234,147,536	17 Unit			50%	
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	69,983,694	20 Unit	392,642,248	25.88	50%	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,517,190,880	100%	110,281,292	24.87	50%	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	443,400,000	72 laporan	282,360,956	26.30	50%	
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,073,790,880	126 laporan	70,928,488	8.89	50%	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	798,268,430	100%	59,893,788	12.97	50%	

	Jabatan	dibayarkan Pajaknya						
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	461,860,000	1 Unit	8,900,000	3.20	50%	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	277,908,430	29 Unit	2,134,700	3.65	50%	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		7,013,467,098	100%	2,500,162,687	35.65	50%	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penigkatan Kualitas Pelayanan Publik Bid. Informasi dan Komunikasi Publik	7,013,467,098	100%	2,500,162,687	35.65	50%	
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3,563,225,000	24 dokumen	849,931,944	23.85	50%	
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	105,568,898	4 permohonan	51,410,000	48.70	50%	
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	37,190,700	4 rekomendasi	12,405,000	33.36	50%	

2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3,307,482,500	24 media	1,586,415,743	47.96	50%	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		5,148,954,570	100%	1,499,079,926	29.11	50%	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Government dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	28,607,000	100%	8,155,416	28.51	50%	
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	28,607,000	1 Dokumen	8,155,416	28.51	50%	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5,120,347,570		1,490,924,510	29.12	50%	
2.16.03.2.02.13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	170,136,138	20 Aplikasi	28,758,958	16.90	50%	
2.16.03.2.02.14	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	12,280,000	4 Dokumen		0.00	50%	
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	16,360,000	2 Laporan	4,080,000	24.94	50%	
2.16.03.2.02.17	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2,040,000	2 Dokumen	2,040,000	100.00	50%	

2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau review arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	352,755,424	4 Dokumen	15,930,000	4.52	50%	
2.16.03.2.02.19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	23,813,500	2 Dokumen	4,530,000	19.02	50%	
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	99,193,500	12 Aplikasi	12,835,000	12.94	50%	
2.16.03.2.02.22	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	13,049,500	2 Dokumen		0.00	50%	
2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi	1,198,526,000	4 Perangkat Daerah	59,663,173	4.98	50%	

		program Kabupaten/Kota Cerdas						
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3,074,223,019	100%	1,344,171,390	43.72	50%	
2.16.03.2.02.26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	70,902,989	4 Dokumen	18,915,989	26.68	50%	
2.16.03.2.02.28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	77,827,500	2 Dokumen		0.00	50%	
2.16.03.2.02.29	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	9,240,000	2 Aplikasi		0.00	50%	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		525,247,920	100%	54,025,573	10.29	50%	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		525,247,920	100%	54,025,573	10.29	50%	
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	525,247,920	100%	54,025,573	10.29	50%	
2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	157,905,040	80 Orang	6,618,149	10.29	50%	
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah	149,512,400	100%	23,490,000	6.74	50%	

	terhadap Sistem Statistik Nasional	yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan						
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	56,335,000	60%	11,488,424	15.71	50%	
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	134,999,480	6 Dokumen	10,644,000	20.39	50%	
2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	26,496,000	5 Dokumen	1,785,000	7.88	50%	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		366,643,400	100%	18,148,671	4.95	50%	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		366,643,400	100%	18,148,671	4.95	50%	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	312,789,400	100%	18,148,671	4.95	50%	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	70,052,200	2 dokumen	18,148,671	4.95	50%	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	144,061,700	1 laporan			50%	

	Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	52,338,000	1 laporan			50%	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	46,337,500	39 PD			50%	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten	53,854,000	100%			50%	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	53,854,000	39 PD			50%	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SI-MOLEK PeDe, Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.2 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 7.717.592.063 atau sekitar 30,84% persen dari total anggaran untuk tahun 2025. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas diantaranya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan data pada tabel 2.3, secara umum pelaksanaan sebagian besar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai dengan triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- 2.2.1 Perlunya penambahan Anggaran Belanja untuk mendukung Program, Visi dan Misi Bupati Priode tahun 2025-2029.
- 2.2.2 Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lainnya yang sesuai

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada tahun 2025, dapat diidentifikasi beberapa isu yang berkembang dan harus ditindaklanjuti sebagai berikut:

2.3.1 Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Aplikasi

- Pengembangan dan penguatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah yang belum tercover.
- Terjadi peningkatan kebutuhan penggunaan internet di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit pendukung serta penambahan titik lokasi free wifi di lingkungan sekolah menengah atas dan sekolah-sekolah kejuruan.
- Peningkatan pengamanan Infrastruktur TIK meliputi Server Aplikasi maupun server Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- Peningkatan kompetensi SDM IT dalam hal penanganan insiden serangan malware terhadap infrastruktur TIK.
- Melanjutkan proses migrasi seluruh aplikasi dan sistem informasi dari serverfarm Diskominfo ke Pusat Data Nasional Kementerian KOMINFO RI.

2.3.1.1 Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kota Cerdas

- Belum optimalnya teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi
- Besarnya tingkat kebutuhan jaringan internet bagi masyarakat

2.3.2 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

- Penguatan Media Center yang menjadi pusat informasi Pemerintah Kabupaten;
- Penyediaan layanan informasi website online.

- Pembentukan masyarakat yang informatif dan inovatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- Pembentukan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
- Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.
- Penyelenggaraan Penyiaran TV Tabalong dan Radio FM Suara Tabalong yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima;
- Pengembangan sumberdaya aparatur di Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong yang menguasai tentang teknologi informasi, jurnalistik, dokumentasi, kehumasan dan lainnya.

2.3.3 Bidang Statistik dan Persandian. Untuk

- Belum optimalnya penyediaan data statistik yang valid dan akurat sesuai dengan kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan, khususnya statistik sektoral
- Masih rendahnya kapasitas SDM bidang statistik sektoral
- Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM SanTel (Sandi - Telekomunikasi) dalam menjaga keamanan informasi
- Masih rendahnya kesadaran pemangku kepentingan akan pentingnya pengamanan jaringan komunikasi dan pengamanan jiwa
- Masih kurangnya sarana prasarana persandian

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam review ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program Kegiatan Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indukatif	Program Kegiatan Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indukatif	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				33.002.162.026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			34,429,017,954	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Nilai AKIP BB	BB	11.970.533.640	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Nilai AKIP BB	12,043,089,568	
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100%	92,997,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	92,997,000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	75,889,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,889,000	
2.16.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Diskominfo	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 dokumen	17,108,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Diskominfo	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	17,108,000	
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Terlaksananya penatausahaan	100%	8,425,651,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Diskominfo	Terlaksananya penatausahaan	8,425,651,000	

			keuangan tepat waktu					aan keuangan tepa		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	8,425,651,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8,425,651,000	
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	350,754,120	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Diskominfo	Meningkatnya Kualitas SDM	350,754,120	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40,709,120	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40,709,120	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	25 Orang	310,045,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	310,045,000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum		475,193,790	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	475,193,790	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	20,794,104	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20,794,104	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan	6 Paket	121,849,615	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket	121,849,615	

			Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19,767,893	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	19,767,893	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	10,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10,800,000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	301,982,178	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301,982,178	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Tersedianya barang milik daerah		310.478.420	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Tersedianya barang milik daerah	350,084,348	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Diskominfo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 buah	6.347.190	Pengadaan Mebel	Diskominfo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45,953,118	

2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	234,147,536	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	234,147,536	
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	69,983,694				69,983,694	
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah		1.517.190.880		Diskominfo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	1,550,140,880	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	443.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	443,850,000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	72 laporan	1.073.790.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1,106,290,880	

			Umum Kantor yang Disediakan					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126 laporan	798,268,430	Kegiatan Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan D	Diskominfo	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	798,268,430	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	461,860,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	461,860,000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	26 Unit	277,908,430	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	277,908,430	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir	1 Unit	58,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58,500,000	

			ehabilitasi					yang Dipelihara/ Direhabilita si		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo		100%	8.722.082.496	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo		8,372,082,496	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bid. Informasi dan Komunikasi Publik	100%	8.722.082.496	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentas e Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Bid. Informasi dan Komunika si Publik	8,372,082,496	
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	Diskominfo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di	12 dokumen Laporan	4.708.360.0000	Relasi Media	Diskominfo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikas i dewan	4,358,360,000	

			Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media					pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Laporan Permohonan	374,997,796	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	374,997,796	
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Diskominfo	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan	4 Dokumen Rekomendasi	60,359,700	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Diskominfo	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan	60,359,700	

			agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah					usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	7500 berita Media	3,578,365,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3,578,365,000	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo		100%	11.378.654.570	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo		12,932,954,570	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Government dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	28,607,000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Government dalam pelaksanaan tugas dan	28,607,000	

								Fungsinya		
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 Dokumen	28,607,000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	28,607,000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo			11.350.047.570	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo		12,904,347,570	
2.16.03.2.02.13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Diskominfo	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	38 Aplikasi	170,136,138	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Diskominfo	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	170,136,138	
2.16.03.2.02.14	Koordinasi penyusunan	Diskominfo	Jumlah	8 Dokumen	12,280,000	Koordinasi penyusunan	Diskominfo	Jumlah	12,280,000	

	proses bisnis		dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo			proses bisnis		dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo		
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Diskominfo	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	6 Laporan	16,360,000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Diskominfo	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	16,360,000	
2.16.03.2.02.17	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Diskominfo	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	111 Dokumen	2,040,000	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Diskominfo	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2,040,000	
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur	Diskominfo	Jumlah dokumen	1 Dokumen	352,755,424	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan	Diskominfo	Jumlah dokumen	352,755,424	

	dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan			peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		
2.16.03.2.02.19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	7 Dokumen	23,813,500	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	23,813,500	
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Diskominfo	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur	1 Aplikasi	102.743.500	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Diskominfo	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai	99,193,500	

			dan peta rencana SPBE pemerintah daerah					arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		
2.16.03.2.02.22	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan	4 Dokumen	13,049,500	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah	13,049,500	

			pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah					yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		
2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Diskominfo	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6 Unit	4.642.251.295	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Diskominfo	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	7,520,526,000	

2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Diskominfo	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	5.856.647.724	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Diskominfo	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	4,536,223,019	
2.16.03.2.02.26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Diskominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen	70,902,989	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Diskominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	70,902,989	
2.16.03.2.02.28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau	Diskominfo	Jumlah dokumen	12 Dokumen	77,827,500	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau	Diskominfo	Jumlah dokumen	77,827,500	

	kolaborasi penyelenggaraan SPBE		koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			kolaborasi penyelenggaraan SPBE		koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		
2.16.03.2.02.29	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Diskominfo	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	3 Aplikasi	9,240,000	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Diskominfo	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	9,240,000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Diskominfo			564,247,920	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			564,247,920	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo			564,247,920	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			564,247,920	
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		564,247,920	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	564,247,920	

2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 Orang	157,905,040	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	157,905,040	
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	1	188,512,400	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	188,512,400	
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas	Diskominfo	Persentase	60%	56,335,000	Peningkatan Kualitas Data		Persentase kegiatan	56,335,000	

	Data Statistik Sektoral		kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu			Statistik Sektoral		statistik sektoral yang rilis tepat waktu		
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Diskominfo	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	30 Dokumen	134,999,480	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	134,999,480	
2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 Dokumen	26,496,000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	26,496,000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Diskominfo			366.643.400	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			516,643,400	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo			366.643.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			516,643,400	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah		312.789.400	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang telah	462,789,400	

			menggunakan Layanan Keamanan Informasi					menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	70,052,200	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	70,052,200	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	1 dokumen	144.061.700	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	294,061,700	

			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 dokumen	52,338,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	52,338,000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 unit	46,337,500	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	46,337,500	

2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten		53,854,000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten	53,854,000	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	40 unit	53,854,000	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	53,854,000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan prioritas pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong telah ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai yang tertera dalam dokumen rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong periode 2025 – 2029

Adapun Program kerja yang akan mewujudkan prioritas pembangunan yang akan dicapai pada Perubahan tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) program yang diimplementasikan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
				10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	Pengadaan Mebel
				12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

				15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				17	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19	Relasi Media
				20	Pelayanan Informasi Publik
				21	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				22	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
		10	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
				25	Koordinasi penyusunan proses bisnis
				26	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
				27	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informas
				28	Koordinasi penyusunan dan/ atau review arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
				29	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
				30	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				31	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
				32	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
				33	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
				34	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
				35	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
				36	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
				38	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
				39	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
				40	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

				41	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				43	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				44	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				45	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		13	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/kota	46	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3. 1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (sebelum perubahan)							Rencana Tahun 2025 (setelah perubahan)				Catatan
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2025			Perubahan Renja 2025				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb Dana	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo			25.573.575.930			25.024.846.628				34.429.017.954		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Nilai AKIP	BB	10.536.665.626	APBD	BB	11,970,533,640	APBD	Nilai AKIP	BB	12,043,089,568	APBD	
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100%	164.577.000	APBD	100%	92,997,000	APBD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100%	92,997,000	APBD	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	141.465.000	APBD	8 dokum en	75,889,000	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	75,889,000	APBD	
2.16.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Diskominfo	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100%	23.112.000	APBD	1 dokum en	17,108,000	APBD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 dokum en	17,108,000	APBD	
2.16.01.2.02	Kegiatan Adminstras	Diskominfo	Terlaksananya	100%	6.264.483.000	APBD	100%	8,425,651,000	APBD	Terlaksananya	100%	8,425,651,000	APBD	

	Perangkat Daerah		penatausahaan keuangan tepat waktu							penatausahaan keuangan tepat waktu				
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bln	6.264.483.000	APBD	29 orang	8,425,651,000	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	8,425,651,000	APBD	
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas SDM	100%	460.934.120	APBD	100%	350,754,120	APBD	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	350,754,120	APBD	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Org	23.209.120	APBD	40 Paket	40,709,120	APBD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40,709,120	APBD	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	19 Org	437.725.000	APBD	25 Orang	310,045,000	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	25 Orang	310,045,000	APBD	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Daerah	Diskominfo	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	861.619.847	APBD		475,193,790	APBD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum		475,193,790	APBD	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Item	34.005.039	APBD	7 Paket	20,794,104	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	20,794,104	APBD	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Item	148.586.657	APBD	6 Paket	121,849,615	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	121,849,615	APBD	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Item	15.868.151	APBD	2 Paket	19,767,893	APBD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19,767,893	APBD	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Item	10.800.000	APBD	4 Dokumen	10,800,000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	10,800,000	APBD	

			Disediakan											
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dok	652.360.000	APBD	50 Laporan	301,982,178	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	301,982,178	APBD	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Tersedianya barang milik daerah	100%	988.353.093	APBD		310,478,420		Tersedianya barang milik daerah		350,084,348		
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	307.873.665.-	APBD								
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	500.000.000,-	APBD								
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Diskominfo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 buah	11.424.942	APBD	10 buah	6,347,190	APBD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 buah	45,953,118	APBD	Meja skat dan kursi
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 buah	127.210.000	APBD	17 Unit	234,147,536	APBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	234,147,536	APBD	
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	41.844.486	APBD	20 Unit	69,983,694	APBD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	69,983,694	APBD	

			Lainnya yang Disediakan											
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100%	1.057.272.672	APBD	100%	1,517,190,880	APBD	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100%	1,550,140,880	APBD	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	443.400.000	APBD	72 laporan	443,400,000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	443,850,000	APBD	Kontribusi sampah
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	613.872.672	APBD	126 laporan	1,073,790,880	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 laporan	1,106,290,880	APBD	Makan/minum hari jadi
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	739.425.894	APBD	100%	798,268,430	APBD	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	798,268,430	APBD	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	416.080.000	APBD	26 Unit	461,860,000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	461,860,000	APBD	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	264.845.894	APBD	1 Unit	277,908,430	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	277,908,430	APBD	

			Dipelihara/ Direhabilitasi											
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	58.500.000,	APBD	29 Unit	58,500,000	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	58,500,000	APBD	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo		100%	7.426.722.496	APBD	100%	7,013,467,098	APBD		100%	8,372,082,496	APBD	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bid. Informasi dan Komunikasi Publik	100%	7.426.722.496	APBD	100%	7,013,467,098	APBD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bid. Informasi dan Komunikasi Publik	100%	8,372,082,496	APBD	
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	Diskominfo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam	12 dok	3.708.360.000	APBD	12 dokumen Laporan	3,563,225,000	APBD	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 dokumen Laporan	4,358,360,000	APBD	Menambah Kebutuhan Kerjasama Media untuk Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Program Prioritas Tabalong Smart serta Pemberian Hibah PWI

			kegiatan relasi media											
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Lap	149.997.796	APBD	4 Laporan Permohonan	105,568,898	APBD	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Laporan Permohonan	374,997,796	APBD	Menambah Pelatihan/ Workshop PPID dan Pengelolaan Informasi Publik

2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Diskominfo	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 dok	60.359.700	APBD	4 Dokumen Rekomendasi	37,190,700	APBD	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 Dokumen Rekomendasi	60,359,700	APBD	Menambah Perjalanan Dinas
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	7.500 berita	3.508.005.000	APBD	7500 berita Media	3,307,482,500	APBD	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	7500 berita Media	3,578,365,000	APBD	Menambah Media Luar Ruang Reklame
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo		100%	6.168.121.988	APBD	100%	5,148,954,570	APBD		100%	12,932,954,570	APBD	

2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Government dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya		83.840.000	APBD	100%	28,607,000	APBD	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Government dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	28,607,000	APBD	
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 dok	83.840.000	APBD	4 Dokumen	28,607,000	APBD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 Dokumen	28,607,000	APBD	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo		100%	6.084.281.988			5,120,347,570				12,904,347,570		
2.16.03.2.02.13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Diskominfo	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	38 Aplikasi	294.026.000	APBD	38 Aplikasi	170,136,138	APBD	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	38 Aplikasi	170,136,138	APBD	

2.16.03.2.02.14	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Diskominfo	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	8 dokumen	12.330.000	APBD	8 Dokumen	12,280,000	APBD	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	8 Dokumen	12,280,000	APBD	
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Diskominfo	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	6 Laporan	16.410.000	APBD	6 Laporan	16,360,000	APBD	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	6 Laporan	16,360,000	APBD	
2.16.03.2.02.17	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Diskominfo	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	111 dokumen	2.040.000	APBD	111 Dokumen	2,040,000	APBD	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	111 Dokumen	2,040,000	APBD	
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 dokumen	615.667.380	APBD	1 Dokumen	352,755,424	APBD	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	352,755,424	APBD	

2.16.03.2.02.19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	7 dokumen	61.797.000	APBD	7 Dokumen	23,813,500	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	7 Dokumen	23,813,500	APBD	
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Diskominfo	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	169.640.000	APBD	1 Aplikasi	99,193,500	APBD	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	99,193,500	APBD	
2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	10.288.000	APBD	4 Aplikasi	10.288.000	APBD	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	10.288.000	APBD	

2.16.03.2.02.22	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	4 dokumen	22.295.000	APBD	4 Dokumen	13,049,500	APBD	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	4 Dokumen	13,049,500	APBD	
-----------------	--	------------	--	-----------	------------	------	--------------	------------	------	---	--------------	------------	------	--

2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Diskominfo	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6 unit	1.450.049.000	APBD	6 Unit	1,198,526,000	APBD	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6 Unit	7,520,526,000	APBD	6,6M = command center tanpa fisik, terdiri dari aplikasi dan peralatan TIK (belum nego) cctv = 322jt. listrik command center 5 bulan = 50jt (max 10jt per bulan) instalasi grounding command center 120jt genset = 300jt (barang mewah ppn 12%) listrik pertama kali = 40jt.
-----------------	---	------------	---	--------	---------------	------	--------	---------------	------	---	--------	---------------	------	---

2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Diskominfo	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	3.226.156.568	APBD	40 Perangkat Daerah	3,074,223,019	APBD	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	4,536,223,019	APBD	700jt = internet desa belanja internet SKPD 3 bulan = 720jt Sewa metro 3 unit kerja , BBI kabitin , Jaro. Kec. Upau = 42jt plang wifi = 30.600.000 stiker wifi = 1.800.000 peralatan jaringan solar cell portable = 40jt
2.16.03.2.02.26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Diskominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 dokumen	112.254.000	APBD	2 Dokumen	70,902,989	APBD	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen	70,902,989	APBD	

2.16.03.2.02.28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Diskominfo	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	82.039.040	APBD	12 Dokumen	77,827,500	APBD	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	77,827,500	APBD	
2.16.03.2.02.29	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Diskominfo	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	3 Aplikasi	9.290.000	APBD	3 Aplikasi	9,240,000	APBD	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	3 Aplikasi	9,240,000	APBD	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Diskominfo			712.498.420	APBD		525,247,920	APBD			564,247,920	APBD	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo		80%	712.498.420			525,247,920				564,247,920		
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	40 rekomendasi	712.498.420			525,247,920		Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		564,247,920		

2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	130 Orang	240.592.440		80 Orang	157,905,040		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 Orang	157,905,040		
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik Untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	200.000.000		1	149,512,400		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	1	188,512,400		penambahan Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia serta Belanja Sosialisasi, Kursus/Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	86.869.000		60%	56,335,000		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	60%	56,335,000		
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Diskominfo	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	30 dokumen	97.061.320		30 Dokumen	134,999,480		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	6 Kegiatan	134,999,480		

2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 dokumen	87.975.660		30 Dokum en	26,496,000		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 Kegiat an	26,496,000		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Diskominfo			729.567.400			366,643,400				516,643,400		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo		100%	729.567.400			366,643,400				516,643,400		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	529.567.400			312,789,400		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi		462,789,400		Penambah an perjalanan Dinas

2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 dokumen	117.958.200		3 Dokumen	70,052,200		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	70,052,200		
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	61.609.200		1 dokumen	144,061,700		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	294,061,700		Penambahan Perjalanan Dinas

2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 dokumen	150.000.000		1 dokum en	52,338,000		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 dokum en	52,338,000		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39 SKPD	200.000.000		40 unit	46,337,500		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 unit	46,337,500		
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten	100%	200.000.000			53,854,000		Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten		53,854,000		

2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	39 SKPD	200.000.000		40 unit	53,854,000		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	40 unit	53,854,000		
-----------------	---	------------	---	---------	-------------	--	---------	------------	--	---	---------	------------	--	--

BAB IV PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2025 ini dilaksanakan dengan memperhatikan catatan-catatan, kaidah-kaidah serta rencana tindaklanjut pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2025 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah (RKAP-PD) sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2025. Seluruh komponen dinas diwajibkan untuk menjabarkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2025 kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Unit/ satuan tugasnya masing-masing.
3. Sumber dana untuk menjalankan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
4. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang dan melekat mulai dari jajaran paling bawah sampai jajaran paling atas pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
5. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
6. Pengendalian dan Evaluasi Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2025 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong. Pada akhir tahun dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2025, yang merupakan evaluasi kinerja tahunan yang terintegrasi dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten

Tabalong tahun 2025-2026, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Kerja tahun berikutnya.

7. Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2025 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan situasi dan kondisi faktual.
8. Dokumen ini dapat dilakukan review dan perubahan mengikuti pola dan perkembangan yang terjadi berdasarkan isu-isu strategis global, nasional dan daerah setelah melalui hasil evaluasi dan kajian yang objektif.
9. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan:

Tanjung, 21 April 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, M.T

Pembina Utama Muda
NIP. 197805081996121002